BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mempertegas posisi desa serta desa adat dan secara konstitusi melahirkan keberpihakan nyata atas pembangunan desa pada masa yang akan datang. Lahirnya undang-undang tersebut bukan sekedar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dana pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga meneguhkan posisi desa sebagai ruang pembangunan di tingkatan paling dasar. Undang-undang tersebut bukan sekedar memberikan ruang untuk percepatan pembangunan tingkat desa, tetapi juga mempertegas hak-hak dasar warga masyarakat yang berdomisili di tingkat desa.[1]

Pada pasal 68 dikatakan bahwa (1) Masyarakat desa berhak: a) meminta dan mendapatkan informasi dari pemeritah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; b) memperoleh pelayanan yang sama dan adil; c) menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; d) memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: 1) Kepala desa; 2) Perangkat desa; 3) Anggota badan permusyawaratan desa; atau 4) anggota lembaga

[1]Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah, *Pelayanan Publik Tingkat Desa* (Yogyakarta: Interpena, 2015), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemasyarakatan desa, e) mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.[2]

Dalam pasal 71 UU desa tentang sumber pendapatan desa menyatakan bahwa sumber pendapatan desa ialah pendapatan asli desa: a) hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong; b) alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara; c) bagian dari hasil retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota; d) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota; e) bantuan dari APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota; f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan; g) lain-lain pendapatan desa yang sah.[3]

Sesuai kebijakan baru, desa akan memperoleh bantuan satu hingga dua milyar pertahun yang diperuntukkan bagi pembangunan desa. Persoalan tersebut yang menjadi tantangan utama desa pada tahun 2015 dan seterusnya. Lahirnya UU desa membawa percepatan pada pembangunan desa namun juga akan melahirkan tantangan baru. Aspek profesionalitas menjadi taruhan dalam pengelolaan keuangan desa.

Tantangan UU desa tersebut yaitu profesionalitas pengelolaan keuangan desa. Kelemahan negara berkembang dalam menyelenggarakan pembangunan terutama terletak pada sumber daya manusia yaitu kualitasnya. Saat ini terus berkembang kehidupan etos kerja yang kurang menunjang pada pembangunan moral bangsa.[4] Seperti budaya konsumtif yaitu masyarakat sulit menginvestasikan kekayaannya untuk hal yang produktif. Budaya hidup destruktif seperti bermalas-malasan, narkoba, minuman keras masih membudaya di Indonesia. Budaya ini tidak sesuai dengan mentalitas manusia pembangunan bahkan menganggu proses pembangunan.

---

[2]Ibid., 30.
[3]... *Pelayanan Publik Tingkat Desa*., 31.
[4]Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga ada sikap *nrimo* pada diri kebanyakan masyarakat Indonesia. Mentalitas sikap ini yaitu dengan kerja dibatasi untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup hari ini tanpa memikirkan hari kedepannya. Kemudian sikap *status oriented* yaitu sikap terhadap kerja yang ditujukan semata-mata kepada kedudukan dan lambangnya serta merasa mempunyai legalisasi terhadap derajat atau gelar. Sikap pasif terhadap hidup yang mengganggu percepatan pembangunan karena manusia memandang hidup penuh dengan kesusahan, mudah menyerah dan putus asa. Terakhir adalah budaya jam karet yang tidak cocok dengan tuntutan pembangunan. Budaya sikap jam karet mencirikan bahwa masyarakat tersebut belum memiliki etos kerja yang produktif.

Berdasar sikap yang tidak mendukung kemajuan pembangunan tersebut maka dibutuhkan pembinaan yang tepat untuk memberantas sikap tersebut. Khususnya menyangkut mentalitas dan motivasi pembangunan yang harus sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tugas manajemen pembangunan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan berupa tenaga kerja yang berkualitas yaitu tenaga kerja yang kreatif, produktif, disiplin, etos kerja, serta mampu mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang.[5]

Kesiapan SDM pada pembangunan tidak lepas dari partisipasi masyarakat sebagai penikmat kebijakan. Masyarakat harus memiliki pandangan untuk maju sehingga pembangunan berkelanjutan berjalan sesuai yang diharapkan. Memang pada tahap awal pembangunan peran pemerintah sangat besar. Bahkan sebagian besar kegiatan pembangunan dilakukan oleh pemerintah. Namun sekalipun dalam keadaan

[5]Ginandjar Kartasasmita, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1997), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara berperan besar pada pembangunan, tetap dibutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan jaminan keberhasilan pembangunan.

Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, tetapi agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri.[6] Dengan demikian tugas penting managemen pembangunan untuk membimbing, menggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kebijakan, peraturan serta kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang, membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat. Dalam hal ini berkembang konsep pemberdayaan masyarakat yang hakikatnya memampukan atau memandirikan masyarakat.

Pada pembangunan berkelanjutan dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat agar pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan. Pembangunan berkelanjutan tidak harus diartikan sebagai pembangunan yang berlangsung secara lancar, mantap tanpa hambatan. Pembangunan masyarakat selalu berjalan bergelombang dan pasang surut. Disebut berkelanjutan apabila mampu mematahkan atau mampu menghindari hambatan-hambatannya dan bergerak lebih lanjut ketingkat keseimbangan yang lebih tinggi.

Saat ini pembangunan berkelanjutan dikenal dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu tentang agenda dari pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan global.[7] SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs (*Millenium Development Goals*). SDGs berlaku dari tahun 2015-

[6]Ibid., 57.
[7]Mickael B. Hoelman dkk, *Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah* (Infid, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2030 yang disepakati oleh 190 negara berisi 17 *goals* dan 169 sasaran pembangunan. Di Indonesia masih sedikit informasi tentang SDGs tersebut karena banyaknya informasi yang dirangkum didalamnya serta tidak semua mudah dipahami.

SDGs berbicara tentang pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa sejak berlakunya desentralisasi di Indonesia, dua pertiga kualitas hidup masyarakat sangat ditentukan oleh baik-buruknya kinerja pemerintah daerah. Seperti kebersihan lingkungan, pendidikan dan kesehatan bergantung pada kinerja pelayanan publik di daerah.

SDGs dibangun dari bawah (*bottom up*) dan partisipatif.[8] Artinya dokumen SDGs dirumuskan oleh tim bersama dengan pertemuan tatap muka lebih dari 100 negara dan survei warga. Solusi yang ditawarkan juga menyeluruh dan berisi 17 tujuan yang berupaya merombak struktur dan sistem. Tujuan tersebut diantaraya adalah kesetaraan gender, tata pemerintahan, perubahan model konsumsi dan produksi, perubahan sistem perpajakan, diakuinya masalah ketimpangan, diakuinya masalah perkotaan.

Proses perumusan SDGs tidak lepas dari aspirasi dan inspirasi dari pemerintah daerah. Melalui asosiasi kota dan pemerintah daerah di tingkat global, pemerintah daerah telah sangat aktif ikut andil dalam perumusan dan pengesahan SDGs. SDGs adalah milik dan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat dan kelompok masyarakat sipil semata. Pemerintah kabupaten dan kota merupakan ujung tombak realisasi SDGs. Tanpa peran aktif mereka, maka SDGs hanya akan gagal atau tercapai sepertiganya.

Salah satu pembangunan berkelanjutan yang diinginkan oleh SDGs adalah pembangunan desa yang merupakan cerminan dari kegiatan, inisiatif serta

[8]Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterampilan antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat. Pada tahap awal pembangunan, peranan pemerintah biasanya besar. Kegiatan pembangunan sebagian besar adalah usaha pemerintah. Selain itu, pemerintah desa juga membantu usaha pemerintah daerah yang sedang menyelenggarakan suatu program di desa. Selain pemerintah desa, adapula Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.[9]

Kegiatan yang menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan inisiatif serta keterampilan masyarakat dan pemerintah terlihat pada program Bhakti Sosial Terpadu (BST). Program BST adalah program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2000 ketika masa jabatan Bupati Djunaedi Mahendra. Program tersebut berisi berbagai kegiatan dan bantuan diberbagai bidang seperti bidang kesehatan, pertanian, peternakan, pendidikan dan sebagainya. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Gandul, Sunarto:[10]

> Program Bhakti Sosial Terpadu itu mencakup banyak bidang. Ada kesehatan, pendidikan, peternakan, pertanian dan lain-lain. Jadi hampir semua bidang dimasuki. Jadi dengan banyaknya kegiatan dalam pogram BST tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena merata disemua bidang.

Dalam program BST, banyak kegiatan dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun bertahap. Bantuan berkelanjutan dimaksudkan untuk pembangunan berkelanjutan yang diharapkan bermanfaat untuk masyarakat secara terus menerus. Demi berlangsungnya pembangunan berkelanjutan, maka dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan bantuan

[9]Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 150.
[10]Sunarto, *Wawancara*, Madiun, 25 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkelanjutan tersebut. Adanya partisipasi masyarakat adalah agar terlaksananya pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan diadakannya program BST.

Fakta menarik pada program BST yang diselenggarakan di desa Gandul oleh Pemkab Madiun adalah masyarakat Gandul belum sepenuhnya memahami tujuan diadakannya program BST. Masyarakat hanya terfokus pada kedatangan Bupati ke desa Gandul pada program BST. Kepala Desa Gandul menyatakan:

> Masyarakat Gandul antusias dengan adanya BST, tetapi antusias pada kedatangan Bupati bukan tujuan program BST. Karena Bupati yang memang jarang bisa ditemui.[11]

Berdasar pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat desa Gandul belum memahami tentang tujuan diadakannya program BST. Masyarakat yang belum memahami secara benar tentang suatu tujuan program pemerintah, akan mengancam pada keberhasilan program tersebut. Selain itu, pemahaman masyarakat Gandul yang kurang tentang tujuan suatu program pemerintah juga akan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat Gandul dalam program pembangunan berkelanjutan.

Selain partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam program pembangunan berkelanjutan atau dalam penelitian ini BST, sosialisasi juga menjadi penting untuk diperhatikan. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami maksud tujuan program yang dilakukan pemerintah. Sosialisasi harus dilakukan oleh pemerintah sebagai administator sehingga dapat menekan angka kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan membentuk masyarakat yang sadar dan memahami pentingnya mengikuti pembangunan berkelanjutan.

Pada program BST yang merupakan program pembangunan berkelanjutan diperlukan kesinambungan antara pemerintah kabupaten (pemkab), pemerintah desa maupun masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pembangunan yang dilakukan

[11]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat tidak dapat berjalan maksimal dan tidak sesuai yang diharapkan. Begitupula apabila kinerja pemerintah dalam pembangunan kurang maksimal maka harapan kesejahteraan masyarakat hanya angan-angan.

Pemerintah desa yang sukses dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa adalah mereka yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi managemen dalam usaha mencapai tujuan. Gagal berhasilnya pembangunan desa tergantung dari kemampuan managemen dari pemerintah desa. Selain itu, dibutuhkan juga partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah desa ialah kesejahteraan yang merata dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Namun tujuan tersebut tidak dapat berjalan sesuai yang dinginkan apabila tidak ada kesinambungan antara pemerintah, pemerintah desa, maupun partisipasi masyarakat.

Seperti tujuan SDGs yang lebih melebar dan sangat partisipatif. Hal tersebut mencerminkan bahwa bukan hanya pemerintah desa atau pemerintah daerah saja yang membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan, tetapi pemerintah pusat maupun negara-negara yang tergabung dalam SGDs mewajibkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan agar *goals* yang diharapkan tercapai.

Pemaparan di atas merupakan gambaran dari latar belakang masalah yang kemudian peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam. Bagaimana partisipasi masyarakat pada pembangunan berkelanjutan melalui program BST di Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar permasalahan, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui program Bhakti Sosial Terpadu di Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana implementasi program Bhakti Sosial Terpadu di Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun?
3. Bagaimana sinergi pemerintah dan masyarakat pada program Bhakti Sosial Terpadu di Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui program Bhakti Sosial Terpadu di Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.
2. Mendeskripsikan implementasi program Bhakti Sosial Terpadu di Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.
3. Mendeskripsikan tentang sinergi pemerintah dan masyarakat pada program Bhakti Sosial Terpadu di Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat pada pembangunan berkelanjutan.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

E. Penelitian yang Relevan

Sebelum penelitian ini, ada beberapa peneliti terdahulu yang terkait dengan penelitian tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa berkelanjutan di Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun (Studi Kasus Program Bhakti Sosial Terpaadu). Menjadi bahan telaah dalam penelitian ini, penulis menggunakan jurnal-jurnal, buku, dan karya tulis lainnya yang terkait dengan judul, yaitu:

1. Jurnal karya Firdasari Nuradilla berjudul "*Inovasi Pelayanan Publik Melalui Bhakti Sosial Terpadu (BST) (Studi pada Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*".[12] Berisi tentang BST yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun menunjukkan adanya inovasi dengan aktivitasnya yaitu melalui pelayanan publik.
2. Skripsi karya Muchoirina berjudul "*Relevansi Pola Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Otonomi (Studi*

[12]http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1373 diunduh pada tanggal 17 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik".[13] Membahas tentang partisipasi masyrakat dalam membangun wilayahnya.

3. Skripsi karya M. Fathoni Hakim berjudul "*Partisipasi Masyarakat Dusun Prajian Utara dan Dusun Prajian Selatan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Tahun 2007*".[14]
4. Buku karya Junwinto, Aca Sugandhy dan Rustam Hakim yang berjudul "*Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*".[15]

Dari referensi yang ditemukan oleh penulis di atas, belum ada penelitian yang mendalam dan terfokus dalam partisipasi masyarakat pada pembangunan desa berkelanjutan melalui program BST di Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Penulis melakukan penelusuran untuk menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tidak ada penelitian yang secara rinci membahas tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa berkelanjutan di Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun (studi kasus program BST).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu berupa kata-kata, gambar, bukan angka. Dengan demikian laporan ini berisi kutipan data untuk

[13]Muchoirina."*Relevansi Pola Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Otonomi (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik",* Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2010.
[14]M. Fathoni Hakim, "*Partisipasi Masyarakat Dusun Prajian Utara dan Dusun Prajian Selatan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Tahun 2007*", Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: UIN Sunan Ampel 2014.
[15]Junwinto dkk, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut dapat berasal dari kutipan wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, atau dokumen resmi lainnya.[16]

Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.[17] Moleong menyatakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[18]

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Penelitian deskriptif kualitatif memusatkan diri pada unit tertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri tersebut memungkinkan studi ini dapat amat mendalam dan kedalaman data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian model ini. Penelitian ini bersifat mendalam pada sasaran penelitian. Deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peranan penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang variable sosial.[19]

---

[16]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 11.
[17]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 8.
[18]Ibid., 9.
[19]Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Penentuan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di desa Gandul, kecamatan Pilangkenceng, kabupaten Madiun dengan alasan sebagai berikut:

a. Menurut pengamatan sementara peneliti, program Bhakti Sosial Terpadu mempengaruhi pembangunan berkelanjutan di desa Gandul.
b. Mengamati partisipasi masyarakat desa Gandul pada program Bhakti Sosial Terpadu.

3. **Informan Penelitian**

Pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut berdasar anggapan tentang informan yang dinilai paling tahu tentang data yang diharapkan atau informan sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.[20] Adapun informan penelitian yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), kepala Desa Gandul, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang mendapat bantuan BST.

4. **Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data diklasifikasikan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.[21] Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden/informan yang diteliti dengan melakukan observasi, wawancara dan alat lainnya. Sumber data primer adalah wawancara dan dokumentasi. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder adalah berbagai literatur atau

[20]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 218.
[21]Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku-buku, koran, berita, maupun online/internet dari sumber terpercaya yang ada kaitannya dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penulis menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Sedangkan triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan observasi, dan wawancara. Observasi dilakukan untuk memperoeh informasi tentang kelakuan manusia pada kenyataan. Observasi dilakukan untuk mengeksplorasi yaitu menjajaki permasalahan terkait penelitian. Spradley dalam Susan Stainback (Sugiyono), membagi observasi berpartisipasi menjadi empat yaitu, *pasive participation, moderate participation, active participation* dan *complete participation*. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan observasi pasif yaitu penulis tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut tetapi mengetahui serta mengamati kegiatan tersebut.[22]

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan untuk menggali informasi-informasi penting dan tajam seputar tema penelitian. Wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi verbal yaitu percakapan bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. biasanya dilakukan saling berhadapan tetapi

[22]Ibid., 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat pula dilakukan melalui telepon. Wawancara dapat berfungsi deskriptif yaitu dapat menggambarkan dunia kenyataan. Selain fungsi deskriptif, wawancara juga berfungsi eksploratif, yaitu apabila penelitian yang dilakukan masih samar atau belum dilakukan oleh orang lain sebelumnya.[23]

Salah satu keuntungan dalam wawancara mendalam adalah agar peneliti lebih mudah merekam hasil wawancara sehingga memudahkan untuk menganalisisnya, sekaligus dalam wawancara mendalam peneliti dapat melakukan observasi langsung sebagai pembantu dan pelengkap pengumpulan data. Teknik wawancara yang dipilih penulis adalah wawancara semi-struktur yaitu penulis lebih bebas dalam menggali data karena pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Ciri-ciri wawancara semi-struktur yaitu:[24]

a. Pertanyaan terbuka tetapi ada batasan tema dan alur pembicaraan.
b. Kecepatan wawancara dapat diprediksi.
c. Fleksibel, tetapi terkontrol (dalam hal pertanyaan atau jawaban)
d. Ada pedoman yang dijadikan patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan kata.
e. Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai

[23]Nasution. *Metode Research: Penelitian Alamiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 106.
[24]Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntas sehingga datanya sudah jenuh.[25] Aktifitas dalam analisis data yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing* (verifikasi).

a. Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak sehingga perlu untuk dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penulis turun ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit sehingga perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah merangkum dan memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian terlihat gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
b. Penyajian data pada penelitian kualitatif yaitu dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Menurut Milen dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[26] Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merancanakan kerja selanjutnya berdasar apa yang telah dipahami. Namun dalam fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis sehingga data juga mengalami perkembangan.
c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka

[25]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 246.
[26]Ibid., 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi gambaran suatu objek yang masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif data yang dianalisa dalam bentuk paparan atau deskripsi kata-kata yang jelas, kemudian data tersebut diinterpretasikan secara rinci yang selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan.

7. Pengujian Keabsahan Data[27]

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektifitas).

a. Validitas internal dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan menggunakan bahan referensi. Melalui tahapan-tahapan tersebut maka akan meningkatkan kualitas data karena adanya pengecakan ulang data yang diperoleh dengan perpanjangan pengamatan. Kemudian adanya pendukung untuk membuktikan data melalui rekaman wawancara sebagai bahan referensi.

b. Validitas eksternal merupakan cara penulis untuk membuat laporannya dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya sehingga pembaca dapat memahami dan menerapkan hasil penelitian di tempat lain.

[27]Ibid., 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Reliabilitas yaitu pembimbing mangaudit keseluruhan aktifitas penulis dalam melakukan penelitian. Dari tahap awal yaitu menentukan fokus masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, hingga membuat kesimpulan merupakan proses yang harus dapat ditunjukkan oleh penulis.

d. Obyektifitas atau menguji hasil penelitian terkait proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan proses dari penelitian yang dilakukan maka penulis telah memenuhi standar konfirmability.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah hasil laporan ini dibangun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu Pendahuluan meliputi subbab latar belakang, fokus penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu serta metode penelitian.

Bab dua Kajian Teori yaitu teori-teori tentang partisipasi masyarakat, kemudian teori pembangunan berkelanjutan, program Bhakti Sosial Terpadu (BST), sinergi pemerintah dan masyarakat pada program Bhakti Sosial Terpadu, serta teori kebijakan publik yang digunakan dalam melihat masalah pada penelitian ini.

Bab tiga Deskripsi Data berisi subbab teknis pelaksanaan kegiatan BST, data potensi Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng, data penerima bantuan Bhakti Sosial Terpadu, hambatan pada program Bhakti Sosial Terpadu, data potensi Desa Gandul, serta data bantuan yang diperoleh Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng.

Bab empat Analisis berisi pembahasan dengan subbab partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan pada program Bhakti Sosial Terpadu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implementasi dan hambatan program Bhakti Sosial Terpadu, serta sinergi pemerintah dan masyarakat pada program Bhakti Sosial Terpadu.

Bab lima Penutup berisi kesimpulan dan beberapa rekomendasi yang diharapkan dijadikan saran atau pertimbangan bagi kajian-kajian berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id